

Jurnalisme Antar Budaya Sebagai Jalan Menuju Toleransi Berbangsa dan Bernegara

Richard G. Mayopu

Abstract

Indonesian Journalism has shown increased after the collapse of new order. Freedom of the press who fought for so long, successfully obtained with full of struggle. However, the use of freedom of the press is apparently still erroneous and inaccurate. The mass media are supposed to be part of the development of the nation's character and religious tolerance, but in Fact, Mass media gave the impression that they did not care about the impact of journalism message. This article aims to explain and describe how tolerance in Indonesia could be built and escorted by journalism in Indonesia. Finally, the results of this paper is that the use of the phrase journalism shows that is not aware of the cultural diversity, and this things would be a "time bomb" in Indonesian society of tolerance and diversity.

Keywords: *Jurnalism, Culture, Tolerance*

Sebuah Awal

Tidak dipungkiri lagi bahwa di negara ini, Indonesia tercinta, persoalan agama masih menjadi satu hal yang sangat dan sering terjadi. Sebut saja dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia diperhadapkan dengan persoalan nasionalisme yang sangat esensial. Kebhinekaan yang menjadi dasar negara ini tertuang dalam Pancasila seharusnya menjadi landasan bangsa ini dalam bertindak. Pada akhir 1990-an, Indonesia dikejutkan dengan kasus dan tragedi Ambon berdarah, isu agama kemudian diangkat sebagai pemicu dan menjadi perhatian bangsa hingga menarik perhatian dunia internasional untuk melihat kondisi apa yang sebenarnya sedang terjadi di tanah ini.

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, termasuk para tokoh agama di tingkat lokal maupun nasional. Disela-sela proses penyelesaian masalah tersebut, muncul lagi tragedi yang sama di Poso Sulawesi Tengah, yang memaksa masyarakat

mengungsi keluar daerah untuk melanjutkan hidup mereka. Isu agama pun menjadi isu yang diangkat dan terjadi pada kerusuhan Poso.

Hingga pada 2015 terjadi dua kasus di dua tempat berbeda yang datang dari ujung timur Indonesia yaitu kabupaten Tolikara Provinsi Papua dan Kabupaten Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Provinsi Aceh. Kejadian ini tentu saja memberikan semacam peringatan kepada masyarakat Indonesia, bahwa persoalan kerukunan umat beragama menjadi kebutuhan dasar bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan “pokok”. Peristiwa ini terjadi pada 7 Juli 2015 lalu, dan menghabiskan sedikitnya puluhan kios, lapak jualan, dan satu Mushola tempat beribadah umat Muslim.

Jika kita mencari tahu mengenai penyebab peristiwa ini, maka akan ada berbagai versi yang muncul dan justru akan menambah keresahan di masyarakat. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengungkap penyebab peristiwa tersebut, namun tulisan ini akan difokuskan pada analisis jurnalisme Indonesia yang seharusnya sadar akan kebhinekaan dan keberagaman di Indonesia.

Media yang ada saat ini bukan cuma menjadi tontonan, namun juga menjadi tuntunan (Kun Wazis, 2012: 133), telah menjelma dari suatu sarana penyalur informasi menjadi sarana pembentuk opini publik. Jika melihat kondisi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya “melek media”, maka pemakluman adalah hal yang harus diberikan pada perkembangan jurnalisme di Indonesia. Namun di lain pihak jurnalisme Indonesia harus berperan untuk memberikan edukasi yang positif agar masyarakat yang saling memahami perbedaan antara satu dan yang lainnya bisa terwujud.

Jacob Oetama dalam bukunya yang berjudul *Berkomunikasi dalam Masyarakat tak Lulus* (2004), banyak memberikan pandangan dan kritikan terhadap melek media di Indonesia. Pengertian secara spontan tidak lulus adalah tidak memaksudkan serta tidak pula mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang hidup dalam pikiran dan hatinya. Dalam keadaan demikian, komunikasi sekadar basa-basi. Komunikasi tidak menyampaikan pesan yang sebenarnya (Oetama, 2004: 4). Pandangan ini tentunya merupakan suatu kritik terhadap teori dan praktik komunikasi yang juga termanifestasi dalam kegiatan jurnalistik di Indonesia. Jika ditarik benang merah antara pemahaman di atas dan konteks jurnalisme Indonesia maka akan sampai pada kebebasan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Refleksi makna dari pemahaman ini adalah bukan semata kebebasan berekspresi dalam menyampaikan informasi, namun

juga kebebasan dalam memberikan edukasi yang sebaik-baiknya bagi masyarakat Indonesia dalam konteks multikultural.

Oleh karena itu maka pesan komunikasi yang harus dirancang, hendaklah menjadi dasar untuk pembangunan mental sebagai bangsa yang multi etnik dan juga ragam sistem kepercayaannya. Sehingga toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara menjadi penting untuk dibangun didalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu kritik juga layak dilontarkan untuk direfleksikan jika berbicara mengenai sistem kepercayaan. Terdapat kekeliruan tafsir dalam memaknai sistem kepercayaan. Jika di Indonesia, sistem kepercayaan dilegalkan dengan kehadiran agama dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, maka di manakah ruang bagi sistem kepercayaan yang tidak diakomodir dalam enam agama yang diakui di Indonesia. Islam, Khatolik, Protestant, Hindu, Buddha, Kong Hu Chu, adalah agama yang diakui di Indonesia, dan merupakan agama yang “beruntung” bisa diakui dan dilegalkan di Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan berikut adalah bagaimanakah nasib sistem kepercayaan lain yang tidak diakomodasi oleh agama-agama di atas. Bagaimana nasib Kejawen (sistem kepercayaan Jawa) atau Marapu (sistem kepercayaan di Sumba) atau juga Jingi Tiu dan Hot Esen yang diyakini oleh masyarakat Sabu dan Timor (Kabupaten Belu). Apakah mereka mendapatkan tempat di negara ini sebagai sistem kepercayaan yang diakui, paling tidak, diakui sebagai sistem kepercayaan dan tidak diberikan sanksi sosial jika penganutnya menjalankan ritual mereka.

Hal di atas tentunya hanya contoh kecil persoalan bangsa Indonesia jika berbicara dan berdiskusi mengenai persoalan agama. Dan, agama merupakan isu yang selalu diangkat oleh media massa di Indonesia untuk dijadikan sebagai “komoditi” yang sangat berpotensi mendatangkan keuntungan dalam kehidupan industri media atau yang sering dikenal dengan istilah kapitalisasi media. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep dan pemahaman yang komprehensif dari semua *stakeholder* untuk bersama-sama berkomitmen untuk membangun sebuah jurnalisme khas Indonesia yaitu Jurnalisme Antar Budaya.

Toleransi Sebagai Satu-Satunya Jembatan

Toleransi selalu dikumandangkan oleh setiap figur baik politik maupun tokoh agama dalam setiap kesempatan. Bahkan di dalam setiap ceramah-ceramah ataupun kotbah-kotbah di gereja kata toleransi ini sering muncul. Kata ini menjadi sangat penting jika kita melihat keberagaman di negara ini. Pada dasarnya kata toleransi berasal dari

bahasa Latin *tolerare* yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai; atau memberi tempat kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat (Siagian dalam Marzuki 2006: 2). Jika kemudian toleransi langsung diartikan sebagai kerelaan untuk berbagi, baik itu tempat ataupun dalam hal-hal tertentu, maka harus ada kesepakatan yang mendasar dari pihak-pihak yang menjunjung tinggi toleransi itu sendiri. Jika satu pihak saja menutup ruang toleransi tersebut, maka toleransi tidak akan terjadi.

Toleransi adalah sama halnya dengan komunikasi. Di mana para pesertanya harus saling memahami dalam melakukan komunikasi tersebut. Jika toleransi melibatkan dua pihak, komunikasi pun demikian. Walaupun ada pemahaman komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan diri sendiri, tetapi pada saat yang bersamaan person tersebut akan mencari person lain dalam dirinya untuk diajak bicara. Jadi secara sederhana, terdapat “dua pihak” yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Dalam bahasa Arab toleransi disebut *tasamuh* yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata *tasamuh* tersebut dapat diartikan agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi pendapatnya (Marzuki 2006: 3) hal ini juga berkaitan erat dengan kesempatan setiap manusia untuk memperoleh hidup yang layak dan jauh akan diskriminasi. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal satu sama lain.

Mengapa perlu toleransi? Tentu saja ini menjadi syarat dalam kehidupan berbangsa yang sering di ucapkan atau dipahami yaitu “rukun” atau kerukunan. Jika ada cara lain yang berfungsi sebagai “jembatan” dalam hubungan berbangsa dalam negara ini, maka kita tidak perlu bersusah-susah dalam memikirkan atau mewujudkan toleransi ini. Namun nampaknya inilah jalan satu-satunya menuju kehidupan bermasyarakat dan bermartabat serta berbagi kebaikan.

Namun sikap ini juga nampaknya harus dijalankan dengan penuh kerelaan bukan keterpaksaan. Jika motivasi bertoleransi manusia Indonesia adalah agar mendapatkan pahala, atau mendapatkan perlakuan baik dari pihak lain, maka pemikiran ini tentulah sangat picik. Betapa tidak, jika suatu hal dilakukan dengan kerelaan, maka harusnya tidak dilandaskan pada *benefit* pribadi yang akan didapat. Keuntungan secara kolektiflah yang harus dicari agar relasi yang dibangun dalam toleransi

ini menjadi *sustainable* dan berlangsung secara terus menerus.

Masyarakat Multikultur dan Bantuan Budaya

Indonesia adalah masyarakat majemuk yang multikultural, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda berakulturasi, dengan menghargai pluralisme sebagai keragaman budaya untuk tetap dilestarikan. Kemajemukan tersebut ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara etnik yang satu dengan etnik lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia. Kebudayaan tersebut juga berupa ritual-ritual sistem kepercayaan yang bahkan masih dipegang teguh hingga saat ini. Menurut Suparlan 1989 (dalam Susiyanto 2006: 85) perbedaan tersebut pada hakekatnya adalah perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing. Puncak-puncak kebudayaan tersebut adalah konfigurasi yang masing-masing kebudayaan memperlihatkan adanya prinsip-prinsip kesamaan dan saling penyesuaian satu dengan lainnya sehingga menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional.

Selanjutnya, terdapat kebudayaan umum yang bersifat lokal yang dapat dilihat sebagai sebuah wadah untuk mengakomodasi proses pembauran atau asimilasi dan proses akulturasi, yang di antara kebudayaan-kebudayaan itu saling berbeda wilayah atau dikelilingi wilayah kebudayaan umum yang bersifat lokal

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah-laku dan tindakan-tindakannya.

Istilah 'budaya' tentunya merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan dengan berbagai makna dalam bermacam konteks dan wacana. Dalam konteks semiotik, budaya dapat dipandang sebagai ringkasan atas kegiatan simbolis yang terarah, dilakukan bersama-sama oleh semua anggota masyarakat, dapat dipelajari, diajarkan, dan

disalurkan ke semua anggota masyarakat, serta dapat digunakan oleh sebuah kelompok masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Juri Lotman menjelaskan “*Culture is the generator of structuredness and the nonhereditary memory of the Community*” (Budaya adalah generator ketersusunan dan peninggalan dari komunitas yang tidak diberikan secara turun temurun” (Lotman 1990: xiii).

Menurut antropologi, “kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar”. Dengan demikian, hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena jumlah tindakan yang dilakukannya dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dibiasakan dengan belajar (yaitu tindakan naluri, refleksi, atau tindakan-tindakan yang dilakukan akibat suatu proses yang panjang).

Kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti “budi” atau “akal” (Koentjaraningrat 2003: 73-74). Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal”. Istilah *culture*, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata “*colere*” yang artinya adalah “mengolah atau mengerjakan”, yaitu dimaksudkan kepada keahlian mengolah dan mengerjakan tanah atau bertani. Kata *colere* yang kemudian berubah menjadi *culture* diartikan sebagai “segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam”.

Seorang Antropolog bernama E.B. Taylor (1871), memberikan definisi mengenai kebudayaan yaitu “kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Antropolog ini menyatakan bahwa kebudayaan mencakup semua yang didapatkan dan dipelajari dari pola-pola perilaku normatif, artinya mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak. Selanjutnya Soekanto menambahkan bahwa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebudayaan tertentu, akan sangat tertarik dengan objek dan subjek kebudayaan seperti rumah-rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi maupun proses komunikasi itu sendiri (Soekanto, 1974: 40). Taylor selanjutnya menjelaskan juga bahwa kebudayaan yang merupakan kompleks menyeluruh yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan serta kebiasaan yang dipunyai manusia sebagai warga negara dari suatu masyarakat, selalu

mempengaruhi pola hidup dalam bermasyarakat (Soekanto, 1984: 158). Pola hidup yang ditafsirkan oleh penulis adalah pola bagaimana masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dan yang lainnya, terlebih masyarakat yang berbeda kebudayaannya.

Definisi lain yang mendukung penjelasan sebelumnya adalah Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar/ tanpa dipikirkan, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Liliweri, 2007: 8). Berikut definisi Kebudayaan dari Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (Samovar & Porter 2003: 8):

Culture as the deposit of knowledge, experience, beliefs, values, attitudes, meanings, social hierarchies, religion, notions of time, roles, spatial relationships, concepts of the universe, and material objects and possessions acquired by a group of people in the course of generations through individual and group striving. (Kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi ruang, pandangan terhadap alam semesta, dan objek material atau kepemilikan yang dimiliki dan dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi).

Dari pengertian-pengertian di atas, maka nampaklah bahwa kebudayaan yang dibangun oleh para ahli selalu mementingkan saling pengertian dalam kehidupan berbudaya. Pemahaman yang dimaknai dalam tulisan ini adalah bahwa agama yang merupakan produk budaya (bagian dari budaya) juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik intoleran. Disamping itu jika kita sadar dalam melihat persoalan-persoalan bangsa yang berkaitan dengan konflik intoleransi khususnya dalam kehidupan toleransi beragama, menjadi penting untuk mengamati penyebab secara umum seperti yang di sampaikan oleh Marzuki (Marzuki, 2006: 4)

Adapun sebab timbulnya ketegangan internal umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek sebagai berikut:

- Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi. Seperti kita ketahui bahwa setiap agama di Indonesia berawal dari misi penyebaran agama oleh bangsa lain.
- Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. Pengetahuan agama harusnya menjadi

hal mutlak seseorang untuk mengabarkan berita kebaikan Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing. Namun hal ini nampaknya sulit diterapkan di Indonesia. Mengingat siapa pun umat beragama yang sudah menggunakan atribut-atribut keagamaan, secara cepat langsung dianggap sebagai tokoh agama yang sangat memahami agama tersebut. Masyarakat Indonesia masih sering terkecoh dengan penampilan luar para “tokoh agama” tanpa melihat pengetahuan agama yang dimilikinya.

- Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain. Di Indonesia, ada ungkapan yang nampaknya layak untuk diutarakan yaitu *“anda boleh menghina saya, tapi jangan pernah menghina Tuhan Saya”*. ungkapan ini sering dimaknai dan bahkan sudah terinternalisasi dengan baik dalam pemikiran masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali saja anda menghina Tuhan dari agama-agama di Indonesia, maka konflik antar agama akan terjadi pada saat itu juga. Konflik yang dimaksud adalah tidak selalu konflik fisik namun konflik batin dan ideologi pemikiran. Dan, justru hal ini yang lebih berbahaya dibandingkan konflik fisik.
- Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
- Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik internal umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah.
- Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat

Jurnalisme Antar Budaya Sebagai Solusi Untuk Melengkapi Jembatan Toleransi

Jurnalisme dan pembangunan merupakan dua konsep yang berpengaruh satu dengan lainnya sebab proses jurnalistik juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan dan begitu pun sebaliknya pembangunan membutuhkan jurnalistik untuk mempublikasikan pembangunan tersebut. Proses pembangunan selalu identik dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah sehingga pemerintah pun membutuhkan metode hingga strategi komunikasi untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Proses komunikasi pun membutuhkan pembangunan, misalnya yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat modern yaitu komunikasi media massa. Media massa membutuhkan infrastruktur untuk

melancarkan proses penyiaran informasi kepada masyarakat luas. Namun konsep jurnalisme pembangunan terkadang hanya difokuskan pada konsep pencitraan pembangunan. Jika jurnalisme adalah paham dalam berjurnalistik, maka Indonesia sudah mempunyai paham jurnalisme yaitu jurnalisme demokratis dan kritis. Namun yang lebih menarik dan kontekstual jika jurnalisme itu dipadukan dengan pemahaman antarbudaya yang baik agar kegiatan jurnalistik itu sendiri dapat berguna sebagai “jembatan toleransi” sehingga optimisme itu menjadi nyata dan bisa dicapai asalkan menggunakan dan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme.

Pemahaman jurnalisme antar budaya, bukanlah sebuah pemahaman yang rumit yang harus melewati proses analisis yang sangat mendalam untuk menjalankannya, namun ini merupakan paham dasar yang harus dimiliki oleh setiap jurnalis dalam berjurnalisme di Indonesia. Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan Negara multikultur dari sabang sampai merauke. Tentunya hal ini memberikan pemahaman dasar bahwa dengan adanya perbedaan budaya, bisa dipakai untuk merangkai pesan jurnalistik yang terjadi. Jika pada awal tulisan ini dimulai dengan kasus Tolikara dan Singkil, sebetulnya dua kasus ini bisa di-*manage* dari segi pemberitaan. Jika kalimat yang digunakan sedikit lebih “*soft*” maka akan menyejukan hati para pembaca. Sebagai contoh kutipan berita dibawah ini adalah berita yang di *download* dari portal berita On Line di Indonesia yaitu CNN INDONESIA.

Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua

Aghnia Adzkie, CNN Indonesia Senin, 20/07/2015 09:22 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyerangan di sebuah kawasan di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, terjadi bertepatan dengan hari raya Idul Fitri oleh umat muslim, Jumat (17/7). Akibat penyerangan, puluhan kios, rumah, dan sebuah mushola hangus terbakar.

Berdalih pengamanan, polisi langsung menembak tiga dari 11 orang yang diduga pelaku penyerangan. Endi Wanimbo (15) yang turut dalam penyerangan, meninggal dunia karena luka tembak.

Sebanyak 10 orang lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan RSUD Dok 2, Jayapura. Polda Papua belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Tepat sehari setelahnya, pejabat daerah bersama Kapolda

Papua Inspketur Jenderal Yotje Mende, Panglima Derah Militer XVII/Cendrawasih Mayor Jenderal Franses G. Siahaan, dan sejumlah tokoh menghelat mediasi. Kesepakatan damai ditandatangani.

Pemerintah daerah akan memberi bantuan modal usaha pada warga yang kiosnya terbakar. Bantuan juga diberikan kepada warga lain yang merugi.

Para pihak sepakat membawa kasus ke jalur hukum. Selain itu, prosedur penembakan oleh aparat juga akan diselidiki.

Kesepakatan serupa diputuskan oleh pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pada hari yang sama. Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Badodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan TNI, menyesalkan kejadian itu dan mengharapkan tidak akan terulang kembali.

Pemerintah menjanjikan perbaikan seluruh bangunan yang terbakar dan akan merawat korban. Polri mengklaim akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan aktor intelektual di balik kejadian Tolikara.

Kementerian Agama bersama dengan ormas keagamaan, forum kerukunan antar umat beragama, dan tokoh masyarakat berjanji menjaga dan memelihara kerukunan. Dalam rilis di situs resminya, Kementerian Agama telah mengirim satu tim ke Kabupaten Tolikara, Papua, untuk mencari akar masalah.

Sentimen Agama?

Beragam asumsi muncul soal modus dan dalang penyerangan. Berbalut sentimen antar-agama, aksi ini menjadi sorotan khalayak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pemicu ketegangan adalah penggunaan pengeras suara saat pelaksanaan Salat Idul Fitri yang hanya berjarak sekitar 250 meter dari tempat dilangsungkannya sebuah seminar internasional oleh Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI). Seminar dihadiri oleh sekitar 2.000 pemuda dari Nias, Sumatera Utara, Papua Barat, Kalimantan (Dayak), Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah.

Soal penggunaan pengeras suara, beredar surat himbuan yang ditandatangani oleh Presiden GIDI Dorman Wandikmbo pada 11 Juli, untuk mengingatkan umat Islam di Tolikara. Surat tersebut bukan untuk melarang ibadah, melainkan imbauan tak menggunakan pengeras suara.

Surat berbunyi, "Mengingat akan diselenggarakannya Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Injili Pemuda Tingkat Pusat bertaraf Nasional/Internasional pada tanggal 15-20

Juli 2015, maka diminta kepada pihak muslim agar tidak melakukan kegiatan peribadatan di lapangan terbuka; tidak menggunakan pengeras suara dan ibadahnya cukup dilakukan di dalam musala atau ruangan tertutup.”

Sementara itu, salah satu warga lokal, Z. Towolom mengatakan, konflik agama tak pernah terjadi di kampung halamannya. Toleransi agama pun dijunjung tinggi.

Towolom yang beragama Kristen dan merupakan jemaat Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, meyakini kerusuhan bukan karena sentimen agama. Hal senada diucapkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang menaungi GIDI, Ronny Mandang. Ronny tak percaya ini adalah gesekan antaragama.

Keduanya meminta agar semua masyarakat, khususnya warga Papua, tidak terpancing oleh isu konflik agama. Alih-alih termakan isu, mereka mengimbau masyarakat perlu menunggu penyelidikan dari penegak hukum untuk mengetahui akar masalahnya.

Desakan Masyarakat

Kecaman serta desakan muncul dari sejumlah lembaga penggiat HAM dan komunitas keberagaman antarumat beragama. Ketua SETARA Institute Hendaridi meminta polisi untuk segera melakukan penyelidikan yang adil terkait kerusuhan di Tolikara, Papua.

Jaringan Gusdurian melalui laman resminya juga mengecam aksi tersebut. Aktivis komunitas tersebut, Alissa Wahid, meminta aparat segera menindak tegas pelaku.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan bakal membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden kerusuhan ini. GMKI menilai ada kejanggalan dari sejumlah informasi yang beredar.

Ketua Umum GMKI Ayub Manuel, timnya akan menelisik penyebab terjadinya insiden. Ayub mengklaim gesekan agama tak pernah terjadi di Papua, terlebih dengan penyerangan rumah ibadah.

Sementara itu, melalui gerakan dunia maya change.org, ribuan orang mempetisi Presiden Joko Widodo, Kalpori Badrodin Haiti, dan Menteri Agama Lukman Hakim. Penggagas petisi, Maimon Herawati, menuntut pemerintah mencokok pelaku penyerangan.

Apa Sikap Pemerintah?

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengunjungi Distrik Karubaga, Ahad (19/7). Bersama Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Badrodin menemui warga setempat. Badrodin juga berdialog dengan Bupati Tolikara Usman Wanimbo dan memberikan bantuan kepada keluarga korban penembakan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dijadwalkan bertolak ke Papua selama dua hari sejak Senin (20/7) untuk memantau kondisi pasca penyerangan dan mendapatkan informasi dari lapangan.

Lebih lanjut, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Lenis Kogoya, bakal berkunjung ke Kabupaten Tolikara untuk mengecek perkembangan kasus tersebut pada akhir Juli mendatang. Kunjungannya sekaligus merespons surat dari Bupati Tolikara yang dilayangkan ke Jokowi.

Pihaknya akan menyelidiki semua kerugian yang diderita para korban dan merehabilitasi bangunan yang terbakar. Selain itu, pemerintah akan menjamin lembaga adat Tolikara telah mengambil langkah dengan melaporkan langsung ke Polres setempat. (ags)

Kutipan berita di atas menggambarkan kronologi singkat bagaimana peristiwa Tolikara tersebut bisa terjadi. Namun ada beberapa pertimbangan yang harusnya dilakukan oleh pihak media dalam *mim-filter* dan *men-sortir* bahasa yang akan digunakan. Dengan melihat bahasa yang digunakan dalam berita tersebut, sebenarnya ada hal yang bisa di kritisi yaitu penggunaan judul berita yang sangat provokatif. “*Usut Dalang Tragedi Tolikara, Kembalikan Damai di Papua*” menjadi judul berita tersebut. Masyarakat kemudian akan bertanya-tanya ada konflik apa yang terjadi di Papua? Dan, Papua bagian mana? Karena kita tentunya sangat mengetahui bahwa wilayah administrasi papua bukan merupakan wilayah yang kecil. Masyarakat Papua akan merasa bahwa Papua sudah tidak aman lagi, sudah terjadi konflik yang mengusik kedamaian. Mengapa kata damai yang harus disematkan pada judul tulisan tersebut? Jika menggunakan kalimat “*Usut dalang tragedy Tolikara, bersatu untuk Papua yang kondusif*” akan terdengar lebih “*soft*”. Namun hal ini juga tentunya dikembalikan pada para pelaku industri media massa karena salah satu kriteria dalam nilai berita adalah bahwa judul berita haruslah

dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian pembaca.

Untuk menegaskan pemahaman jurnalisme antar budaya, berikut ini adalah contoh berita dari portal berita On Line Tempo.co.id:

SELASA, 21 JULI 2015 | 05:23 WIB

Ini Dalang Kerusuhan di Tolikara Papua Versi Kapolri

*TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian kini memburu dalang **kerusuhan** di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, yang terjadi tepat pada perayaan Idul Fitri, Jumat pekan lalu. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, hingga kemarin, penyelidikan untuk mencari pelaku dan provokator **kerusuhan** itu masih berlangsung dengan meminta keterangan sejumlah saksi.*

Dari pemeriksaan tersebut, kata Badrodin, kepolisian telah mengantongi sejumlah calon tersangka. Namun dia enggan menyebutkan detail soal jumlah dan identitasnya. "Kami masih melengkapi alat bukti," ujarnya ketika ditemui di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut dia, kepolisian akan menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, seperti penodaan agama dan perusakan fasilitas umum. "Biasanya polisi men-juncto-kan pasal supaya semua bisa kena," ujarnya.

*Sehari setelah **kerusuhan** meletus, Sabtu lalu, Badrodin terbang ke Karubaga, Tolikara, untuk melihat langsung lokasi insiden. Di distrik yang terletak sekitar 265 kilometer arah barat daya Kota Jayapura tersebut, dia bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat untuk mengetahui akar kerusuhan.*

***Bentrokan** terjadi pada Jumat pagi lalu, ketika puluhan orang yang diduga anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) memprotes penyelenggaraan salat Id di lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga. Mereka berdalih telah memberitahukan agar kegiatan ibadah Lebaran tak dilaksanakan di daerah tersebut karena berbarengan dengan acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI.*

Polisi yang mengamankan lokasi sempat mengeluarkan tembakan peringatan. Namun massa mengamuk hingga menyebabkan puluhan kios dan sebuah musala di sekitar lapangan habis terbakar. Seorang korban tewas dan belasan lainnya luka-luka terkena tembakan peluru.

Badrodin mengatakan polisi akan memeriksa Pendeta Nayus

Wenda dan Marten Jingga. Ketua dan Sekretaris Badan Pekerja GIDI Wilayah Tolikara tersebut akan dimintai klarifikasi mengenai surat yang diduga mereka teken pada 11 Juli lalu. Selain memberitahukan penyelenggaraan seminar dan KKR pemuda GIDI pada 13-19 Juli 2015, surat itu berisi larangan perayaan Lebaran dan pengenaan jilbab di Tolikara.

Menurut Badrodin, kepala polres dan bupati Tolikara telah bertemu dan berkomunikasi dengan panitia seminar dan KKR pemuda GIDI pada 15 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, telah ada kesepakatan untuk meralat surat tersebut. "Saya melihat ada miskomunikasi dan pesan yang terputus di sini," kata Badrodin. "Surat yang diralat itu belum sempat tersosialisasi dan disampaikan secara tertulis."

*Tim Advokasi Muslim kemarin juga melaporkan Nayus Wenda dan Marten Jingga ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Gara-gara surat mereka, kata Wakil Ketua Tim Advokasi Muslim Rizal Fadillah, **kerusuhan** terjadi dan berujung pada terbakarnya musala di Tolikara. "Kami meminta polisi menangkap dua orang tersebut," kata Rizal.*

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Rudolf Patrige Renwarin mengatakan, hingga kemarin siang polisi telah memeriksa 27 orang. Sebanyak 21 orang adalah warga sipil yang diperiksa berkaitan dengan pembakaran kios, rumah, dan masjid. "Enam orang di antaranya adalah aparat kepolisian terkait tertembaknya sebelas orang warga sipil," kata Patrige.

Ada pola yang terjadi dan bisa diamati dalam kutipan berita di atas. Pendramatisiran peristiwa terdapat dalam kutipan tersebut dan penggunaan kata yang "kurang tepat" jika dikaitkan dengan pendidikan budaya yang akan dibangun. Yang pertama adalah penggunaan kata "**kerusuhan**". Bangsa Indonesia memiliki sejarah kelam konflik antar agama dan sangat menguras waktu, tenaga dan tentu saja butuh perhatian penuh untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga berusaha mencegah agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Disela-sela proses pembelajaran di kelas - kelas di perguruan tinggi, jika anda menanyakan kepada mahasiswa anda, apa yang anda pahami tentang kerusuhan? Maka hampir bisa dipastikan bahwa jawaban para mahasiswa akan tertuju pada konflik antar agama.

Kerusuhan adalah konflik agama, dan "kata yang dianggap tepat" untuk menggambarkan konflik agama adalah kerusuhan. Namun harus dipahami juga bahwa trauma bangsa ini belum bisa hilang dan lepas

dari konflik antar agama yang terjadi di Ambon dan Poso seperti yang sudah dipaparkan dalam bagian awal tulisan ini. Sehingga penggunaan kata kerusuhan dalam setiap pemberitaan di media massa akan membangkitkan kembali trauma masa lalu tersebut. Kata ini memiliki arti dan makna yang sangat mendalam bagi para korban tragedi konflik antar agama di Ambon dan Poso. Dengan kata lain, media massa dengan segala pengetahuan, kemampuan dan etika yang dimiliki, justru secara perlahan membangkitkan kembali "luka lama" yang ingin dikubur dalam-dalam oleh bangsa ini. Sehingga pada tahap ini, kontribusi media massa dalam membangun toleransi di Indonesia kembali dipertanyakan.

Yang kedua, adalah frekuensi penggunaan kata "kerusuhan" yang mencapai lima kali penulisan termasuk judul yang dipakai. Penegasan kata yang dipakai secara berulang inilah juga yang kemudian semakin meningkatkan frekuensi trauma pembaca. Jika seorang individu bukan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang pernah berada dalam konflik antar agama, individu tersebut mungkin akan menanggapi bahasa ini selayaknya bahasa yang biasa digunakan tanpa memiliki makna khusus yang secara spesifik mengacu pada pengalaman masa lalu individu tersebut. Namun hal sebaliknya akan sangat terasa, jika individu tersebut berasal atau merupakan bagian dari kelompok yang terlibat dalam konflik antar agama tersebut.

Masyarakat Indonesia sudah seharusnya bisa "*Move on*" dari permasalahan konflik antar agama ini. Dan media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam mensukseskan hal tersebut. Padahal jika diamati dalam kutipan di atas, berita tersebut sudah menggunakan kata yang dinilai tepat untuk menggambarkan peristiwa tersebut yaitu "**bentrokan**". Namun kata ini hanya digunakan satu kali saja. Hal ini menunjukkan inkonsistensi penulisan jurnalistik. Jika pada bagian judul dan beberapa paragraf menggunakan kata kerusuhan, maka harusnya kata kerusuhanlah yang harus selalu digunakan. Ini pun menjadi refleksi ber-jurnalis di Indonesia.

Kata "**bentrokan**" bisa diartikan untuk menjurus pada pertikaian antar kelompok saja. Masyarakat diberi kebebasan untuk membuat opini berkaitan dengan isu yang diberikan. Kata bentrok bisa digunakan untuk untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Pemaknaan kata bentrok dan kerusuhan tentu saja berbeda. Jika kerusuhan dimaknai sebagai konflik antar agama, maka bentrok dimaknai sebagai konflik antar kelompok dan tidak bisa dikatakan langsung menjurus pada konflik agama, karena bisa juga dimaknai sebagai konflik antar etnis,

kelompok RT/RW, kelompok pelajar, kelompok kampung atau desa, dll. Sehingga jurnalisme antar budaya bisa dipahami sebagai sebuah paham jurnalisme yang sadar akan keberagaman baik itu budaya yang bisa berupa suku, agama, dan ras. Sehingga dalam proses berjurnalistik di Indonesia mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Bercermin dari kasus di atas, maka penggunaan bahasa jurnalistik harus sadar akan makna yang tentu saja berbeda jika dilihat dari berbagai tradisi budaya tertentu. Pemaknaan kata "**bentrokan**" dan "**kerusuhan**" yang tentu saja berbeda dalam memaknainya bagi budaya tertentu bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi para jurnalis dan pelaku-pelaku industri media di Tanah Air, agar nantinya bukan memberikan informasi yang jelas, namun justru menimbulkan keresahan-keresahan baru yang terjadi dalam masyarakat

Kesimpulan

Jurnalisme yang paham akan budaya dan nilai-nilai di dalam sistem kebudayaan tersebut, harus dimiliki oleh setiap insan jurnalis maupun pelaku industri jurnalisme di Indonesia. Mengapa demikian? Kebhinekaan sudah disepakati menjadi bagian dasar pembentukan negara ini. Sehingga pengetahuan akan budaya menjadi mutlak untuk dimiliki. Dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi ini, maka Indonesia mempunyai potensi untuk pengembangan jurnalisme yang memiliki ciri dan karakter. Kebudayaan merupakan aset yang harus dikembangkan tidak saja dari segi pariwisata yang mana dalam setiap kegiatan kepariwisataannya, terkesan seperti "menjual Budaya", namun juga bisa dikembangkan dari aspek jurnalistik. Sehingga, di masa yang akan datang, akan hadir jurnalistik berbudaya yang sangat paham akan kebhinekaan yang nantinya akan menunjang toleransi berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat 2003. *Pengantar Antropologi Jilid I*, PT Rineka Cipta Jakarta
- Liliweri, Alo, 2007. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*, PT. LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta
- Lotman, Juri 1990. *Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. (Translated by Ann Shukman, introduction by Umberto Eco)*. I. B. Tauris & Co Ltd, London & New York:

- Marzuki. 2006. *Konflik antar Umat Beragama di Indonesia dan Alternatif Pemecahannya* Makalah disampaikan pada Seminar tentang Revolusi Konflik, Senin 20 November 2006 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Oetama, Jacob. 2004. *Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tak Lulus*, Kompas Media Nusantara Cetakan ke 4 Jakarta
- Samovar, Larry A. (San Diego State University) & Porter Richard E. 2003. *Intercultural Communication A Reader 10th Edition*, USA (California State University, Long Beach, Emeritus)
- Soekanto, Soerjono. 1974. *Sosiologi Suatu Pengantar* , Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta
- Susiyanto, Juni 2006. *Solidaritas Sosial Cina Muslim Dan Non-Muslim Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Studi di Kota Bengkulu*, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Edisi Khusus, (Hal 84-98)
- Wazis, Kun. 2012. *Media Massa dan Konstruksi Realitas* , Aditya Mega Publishing Yogyakarta

Sumber Internet

- <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/21/063685235/ini-dalang-kerusuhan-di-tolikara-papua-versi-kapolri>
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150720092213-20-67220/usut-dalang-tragedi-tolikara-kembalikan-damai-di-papua/>

